

A. Daftar Buku

Hadjon, Philipus M., 1991, "*Peradilan Tata Usaha Negara Tantangan Awal Ji Awal Penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986*", Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

-----, 1994, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harsono, Budi, 1999, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Djambatan, Jakarta.

-----, 2000, "*Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*", Djambatan, Jakarta.

Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Marbun, S.F., 2000, "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*" Liberty, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi 4, cetakan I, Liberty, Liberty.

Setiawan, Wawan, 1996, *Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Media Notariat, Jakarta.

Situmorang, Victor, 1993, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, 2001, "*Hukum Perjanjian*", P.T. Intermasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1996, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta,

Soepadmo, Djoko, 1995, "*Tehnik Pembuatan Akta Seri B-3*", P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

-----, 1995, "*Kumpulan Contoh-Contoh Akta Notaris Seri A-2*". P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

Soerodjo, Irawan, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*", Arkola, Surabaya,

Soedjendro, Juliana Kartini, 2001, "*Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*", Kanisius, Yogyakarta,

Tan, Thong Kie, 2000. "*Studi Notariat*", Buku I, P.T. Midas Surya Grafindo, Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

WIKANADI, Anjar Wahyu, Djoko Sukisno, S.H., CN

Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

-----, 2000, "*Studi Notariat*", Buku II, : P.T. Midas Surya Grafindo, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1999, "*Peraturan Jabatan Notaris*", P.T. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Tresna R, 1996, "*Komentar H.I.R.*", Prajnya Paramita, Jakarta.

Wijowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru – van Hoeve*, Jakarta.

B. Daftar Makalah

Setiawan, Wawan, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, makalah pada pembahasan RUU Jabatan Notaris pada Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya dan Jakarta, Maret 1988

C. Daftar Peraturan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP LN No.39 tahun 1998, TLN No. 3746



Peraturan Menteri Agraria Nomor. 3 Tahun 1997 Kementerian Negara Agraria,
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Kementerian Negara Agraria, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor.37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah, PerMen Agraria
Nomor. 4 Tahun 1999